



**LAPORAN AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
( LAKIP )**

**TAHUN 2024**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS**



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS  
2025**

## **KATA PENGANTAR**

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2024.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Tahun 2024 dan analisisnya, Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya.

Bengkalis, 23 Mei 2025

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS,**

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS" at the top and "DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK" at the bottom, separated by two stars. In the center of the stamp is a shield-shaped emblem. Overlaid on the stamp is a blue ink signature that appears to read "Emilda Susanti".

**EMILDA SUSANTI, S. STP, M. IP**

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP.19810323 199912 2 001

# DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	2
C. Tugas dan Fungsi DPPPA .....	4
D. Struktur Organisasi.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026.....	8
B. Perjanjian Kinerja.....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	14
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	14
B. Realisasi Anggaran .....	31
BAB IV PENUTUP.....	33
LAMPIRAN	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Laporan kinerja tahunan menggambarkan pencapaian indikator kinerja

yang ditetapkan didalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan kegiatan serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2024. Adapun maksud dan tujuannya adalah :

### **Maksud :**

1. Sebagai amanah dari pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Renstra Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang juga merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

2. Laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders.
3. Laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

**Tujuan:**

1. Sebagai dokumen operasional indikatif yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah;
2. Menjadi dasar dan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis dalam penyusunan kebijakan dan rencana kerja (Renja) tahunan dalam kurun waktu lima tahun;
3. Menjadi alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis
4. Menjadi alat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis

### **C. Tugas dan Fungsi**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Memiliki tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebut diatas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan teknis di Bidang penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis. Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan

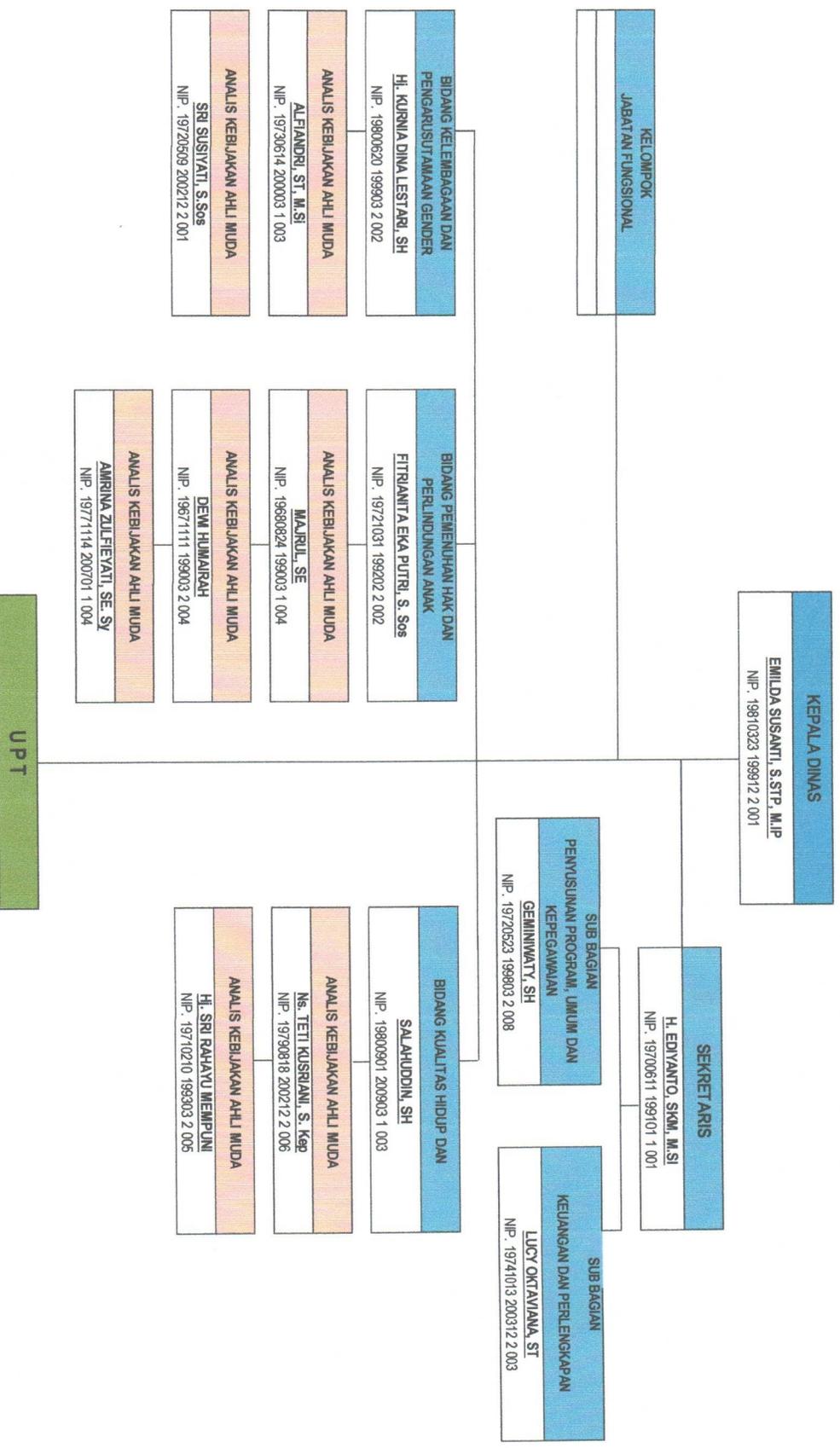
Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari:

1. Kepala
2. Sekretaris
3. Sekretariat, terdiri dari:
  - a) Sub Bagian Penyusunan Program Umum dan Keperawaian
  - b) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
4. Bidang Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Kelompok Jabatan Fungsional (JF)
5. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dan Kelompok Jabatan Fungsional (JF)
6. Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Kelompok Jabatan Fungsional (JF)
7. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak

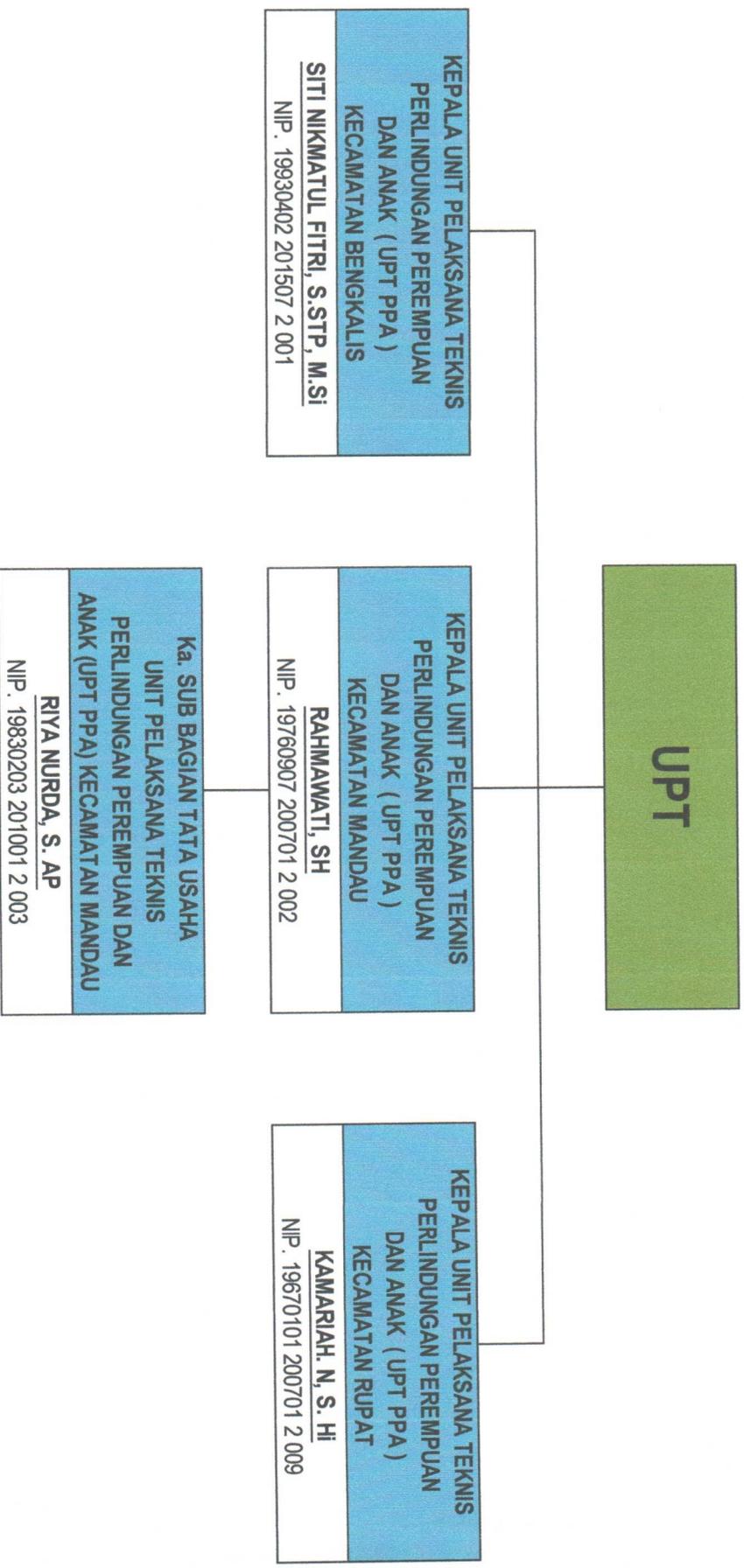
## D. Struktur Organisasi

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEMERDAAYAN PEREMPUN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR : 97 TAHUN 2021  
TANGGAL : 30 DESEMBER 2021



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS**



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 – 2026 dan menjawab Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024.

#### **A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2026 disusun mengacu pada visi misi pembangunan 5 (lima) tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi pembangunan 5 (lima) Tahun Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera”.

Dalam mewujudkan visi Kabupaten Bengkalis maka misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bengkalis adalah “Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-Nilai agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter”.

Tujuan yang dicapai dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Bengkalis yaitu “Terwujudnya Masyarakat Yang Berkarakter” dengan sasaran “Terwujudnya Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pembangunan Melalui Agenda Perempuan Berdaya Keluarga Sejahtera” Mengacu dari Visi dan Misi RPJMD, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan Visi sebagai berikut “Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemenuhan Hak Anak Menuju Pembangunan Manusia Berdaya Keluarga Sejahtera”.

Perencanaan Kinerja merupakan indikator kinerja sasaran strategis, program dan kegiatan yang disusun dan disepakati untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang meliputi:

- 1) Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan,
- 2) Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan,
- 3) Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus
- 4) Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi perkantoran dan barang milik daerah
- 5) Meningkatnya kualitas sumberdaya dan kinerja aparatur
- 6) Meningkatnya kualitas capaian kinerja dan penatausahaan keuangan yang terdapat pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 –2026 Kinerja disepakati bertujuan mewujudkan indikator dari sasaran yang seharusnya tercapai mencakup hasil (outcome) dan keluaran (output) melalui program dan kegiatan. Perencanaan kinerja juga merupakan indikator yang menjadi perjanjian kinerja yang

ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai nilai ukur pencapaian keberhasilan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021 – 2026.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 :

SASARAN	INDIKATOR / SASARAN	Kondisi awal 2021	TARGET KINERJA TAHUN KE				
			2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pembangunan Melalui Agenda Perempuan Berdaya Keluarga Sejahtera	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG	69,23	72	75	80	90	100
	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	1	1	1	1	1	0
	Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam Keluarga	5	12	19	25	30	35
	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Sistem Data Gender dan Anak	5	20	25	30	35	45
	Tingkat Capaian Kabupaten / Kota Layak Anak	MADYA	MADYA	NINDYA	NINDYA	UTAMA	UTAMA
	Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak	30	20	18	15	10	5

Adapun pada bulan September Tahun 2024 dilakukan perubahan Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran dengan menyesuaikan pada perubahan Pohon Kinerja terbaru yang selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan penyusunan dokumen pada tahun berikutnya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

SASARAN	INDIKATOR / SASARAN	Kondisi awal 2021	TARGET KINERJA TAHUN KE				
			2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,5	90,75	90,1	91,5	92	92,1
	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	69,23	72	75	80	90	100
Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	1	1	1	1	1	0
Meningkatnya Perlindungan Anak	Predikat Kabupaten / Kota Layak Anak	MADYA	MADYA	NINDYA	NINDYA	UTAMA	UTAMA
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	B	BB	BB	BB	BB	BB

## B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja berisi sasaran kinerja, indikator kinerja, dan target kinerja yang diperjanjikan dalam satu tahun serta memuat rencana anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis.

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 (sebelum perubahan) dapat dilihat pada table dibawah ini :

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	
1.	Terwujudnya Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pembangunan Melalui Agenda Perempuan Berdaya Keluarga Sejahtera	1	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG	75%
		2	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	1%
		3	Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam Keluarga	19%
		4	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Sistem Data Gender dan Anak	25%
		5	Tingkat Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak	NINDYA
		6	Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak	18%
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan PD	1	Predikat Akuntabilitas Kinerja	BB
		2	Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%

Selanjutnya pada bulan September Tahun 2023 dilakukan penyusunan prototype Perjanjian Kinerja dengan menyesuaikan pada perubahan Pohon Kinerja terbaru yang selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja pada tahun berikutnya.

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 setelah perubahan adalah

sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,5%
		2	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	80%
2.	Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	1	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	1%
3.	Meningkatnya Perlindungan Anak	1	Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak	NINDYA
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021- 2026 maupun Renja Tahun 2024.

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan bentuk pertanggung-jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2024. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pencapaian kinerja Kabupaten Bengkalis yang berhubungan dengan pencapaian sasaran pada tahun anggaran 2024 mendukung pencapaian kinerja RPJMD Kabupaten Bengkalis. Pada laporan ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis memberikan gambaran perbandingan capaian kinerja pada Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam

dokumen penetapan kinerja yang disepakati melalui Perjanjian Kinerja.

Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021					
SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Tahun 2021			
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
<b>Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak, Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Bengkalis</b>	1	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG	89,96%	70%	70%
	2	Persentase Anggaran Responsif Gender Organisasi Perangkat Daerah dalam APBD	24%	68%	68%
	3	Tingkat Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak	25%	30%	30%
	4	Persentase Forum Anak yang terbentuk (Kab/Kota, Kecamatan dan Kelurahan)	43,23%	50%	50%
	5	Persentase Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) sesuai standar	20	15	15
	6	Persentase Pusat Kreatifitas Anak (PKA) sesuai standar	0%	0%	0%
	7	Persentase Lembaga Layanan Kesehatan (Puskesmas dan rumah Sakit) Ramah Anak sesuai standar	15%	18%	18%
	8	Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD, MI, SMP, MTs) sesuai standar	0,07%	0,07%	0,07%
	9	Persentase lembaga pengasuhan alternatif ramah sesuai standar	23,25%	23,25%	23,25%
	10	Persentase kelembagaan PUG yang aktif	8,80%	10%	10%
	11	Persentase perempuan di lembaga legislative	0,43%	0,43%	0,43%

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022				
SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Tahun 2022		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
<b>Terwujudnya Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pembangunan Melalui Agenda Perempuan Berdaya Keluarga Sejahtera</b>	1 Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG	72%	8%	11%
	2 Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	1%	0.000066%	100%
	3 Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam Keluarga	12%	16%	133%
	4 Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Sistem Data Gender dan Anak	20%	34,04%	170%
	5 Tingkat Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak	MADYA	PRATAMA	PRATAMA
	6 Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak	20%	0.000561%	100%
<b>Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan PD</b>	1 Predikat Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	BB
	2 Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Untuk tahun 2023 capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis berdasarkan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Prototype Tahun 2023 dan selanjutnya akan dijadikan acuan penyusunan dokumen pada tahun berikutnya. dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Berdasarkan Prototype Perjanjian Kinerja Tahun 2023				
SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Tahun 2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,1%	89,94	99,82
	2 Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG	75%	4,26%	5,7%
Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	1 Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	1 %	0.0001%	100%
Meningkatnya Perlindungan Anak	1 Predikat Kabupaten /Kota Layak Anak	NINDYA	MADYA	MADYA
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1 Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB

Berdasarkan Prototype Perjanjian Kinerja Tahun 2024				
SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Tahun 2024		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,5%	89,91	98,26
	2 Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG	80%	95,7%	120%
Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	1 Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	1 %	0.01%	100%
Meningkatnya Perlindungan Anak	1 Predikat Kabupaten /Kota Layak Anak	NINDYA	Data Belum Rilis	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1 Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB

Analisis atas capaian kinerja sasaran dikaitkan dengan indikator kinerjanya dapat diuraikan sebagai berikut :

**SASARAN 1 : MENINGKATNYA PENGARUSUTAMAAN GENDER**

Sasaran Meningkatnya Pengarusutamaan Gender diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu :

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,5%	89,91	98,26
Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG	80%	95,7%	120%

Penjelasan untuk sasaran strategis pada capaian indikator kesatu adalah sebagai berikut :

Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Konsep gender secara umum bukan diartikan sebagai perbedaan jenis kelamin, namun perbedaan peran sosial, ekonomi, dan politik antara laki-laki dan perempuan.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah salah satu indeks yang setiap tahun dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. IPG diperoleh melalui perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

laki-laki. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Capaian kinerja atas Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) yaitu :

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,5	89,91	98,26

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Gender Tahun 2024 memiliki Target 91,5 sementara realisasi 89,91 dan capaian 98,26. Terpenuhinya pembangunan kapabilitas dasar manusia pada bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi dengan mempertimbangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan merupakan salah satu faktor keberhasilan indeks Pembangunan Gender Kabupaten Bengkalis serta harus memperhatikan pencapaian kapabilitas dasar penduduk laki-laki dan perempuan agar kesenjangan antara keduanya tidak menjadi besar agar Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Bengkalis terus meningkat.

Kesetaraan gender menurut United Nations mengacu pada persamaan hak, tanggung jawab dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender juga berarti bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama dalam merealisasikan apa yang menjadi hak-hak asasi mereka dan mampu berkontribusi dalam pembangunan dalam hal ekonomi, sosial dan budaya serta politik.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Kabupaten Bengkalis telah menempati posisi cukup baik dibandingkan kabupaten Kota lainnya sebagaimana ditunjukkan oleh tabel berikut :

PROVINSI / KABUPATEN / KOTA	INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)		
	2022	2023	2024
Kota Pekanbaru	93,63	93,89	94,04
Kota Dumai	90,74	90,92	91,35
Kuantan Singingi	90,48	90,47	90,69
Kampar	89,81	89,87	90,18
Bengkalis	90,11	89,94	89,91
Pelalawan	88,94	89,37	89,44
Siak	88,79	88,93	89,03
Kepulauan Meranti	86,97	87,35	87,44
Indragiri Hulu	86,73	87,07	87,41
Rokan Hilir	85,13	85,38	85,81
Indragiri Hilir	82,74	83,20	83,70
Rokan Hulu	82,44	82,72	83,05
<b>RIAU</b>	<b>88,71</b>	<b>88,98</b>	<b>89,32</b>
<b>INDONESIA</b>	<b>91,63</b>	<b>91,85</b>	<b>91,85</b>

Angka IPG yang terlihat pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2022 dan 2023 Kabupaten Bengkalis masuk dalam urutan IPG ke 4 tertinggi dari 12 Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Riau sebesar 90,11 dan 89,94, data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bengkalis sudah melebihi target IPG Provinsi Riau sebesar 88,71 dan 88,98. Sedangkan pada Tahun 2024 untuk IPG Kabupaten Bengkalis sebesar 89,91 mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya namun masih di atas target IPG Provinsi Riau sebesar 89,32. Dari data diatas terlihat

bahwa meskipun Kabupaten Bengkalis sudah melebihi target IPG Provinsi Riau namun masih belum mencapai Target Nasional.

Adapun upaya untuk meningkatkan IPG Kabupaten Bengkalis, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis melakukan program dengan kegiat-kegiatan pelatihan keterampilan bagi perempuan. Pelatihan yang diberikan kepada Perempuan pada tahun 2024 adalah :

1. Pelatihan digital marketing
2. Pelatihan kuliner
3. Pelatihan olahan hasil laut seperti Mpek-mpek, nugget ikan, dan bakso ikan
4. Pelatihan handcraft dan
5. Pelatihan punch needle

Dengan terlaksananya Pelatihan tersebut diatas diharapkan perempuan bisa mendapatkan pengetahuan yang dapat dikembangkan dan pada akhirnya dapat memberikan sumbangan penghasilan bagi perempuan dan keluarganya. Pelatihan pemberdayaan perempuan tersebut mampu meningkatkan pencapaian IPG, Kondisi ini memberikan gambaran perempuan di Kabupaten Bengkalis semakin berdaya dan mandiri.

Penjelasan untuk indikator kedua dari sasaran Meningkatnya Pengarusutamaan Gender adalah sebagai berikut :

Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang merupakan instrument untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, control dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki secara setara.

Capaian kinerja atas Indikator Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG yaitu :

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG	80%	95,7%	120%

Rumusan atas indikator tersebut adalah :

$$= \frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG}}{\text{Jumlah Seluruh Perangkat Daerah}} \times 100$$

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pada Indikator Kinerja Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Pada Tahun 2022 memiliki target 72% terealisasi 8% dengan capaian 11% sedangkan pada tahun 2023 memiliki target 75% terealisasi 4,26% dengan capaian 5,7% hal ini menunjukkan adanya penurunan capaian dari tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2023 hanya ada 2 Perangkat Daerah yang

melaksanakan perencanaan pembangunan yang responsif gender sedangkan pada tahun 2022 ada 4 Perangkat Daerah.

Terdapat beberapa hambatan/kendala dalam pencapaian target tersebut yaitu :

1. Karena adanya rasionalisasi anggaran sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan
2. Perangkat Daerah sebelumnya sudah pernah mengikuti pelatihan perencanaan penganggaran responsif gender namun hanya beberapa Perangkat Daerah saja yang melakukan perencanaan penganggaran responsif gender ditahun selanjutnya
3. Sebagai upaya perbaikan ke depan, akan dilakukan langkah-langkah antisipatif agar pencapaian target menjadi lebih baik, yaitu:
  - 1) Perlu dilakukan pelatihan lebih dalam kepada Perangkat Daerah
  - 2) Meningkatkan kerjasama yang lebih intensif kepada Perangkat Daerah terhadap pentingnya penganggaran yang responsive gender.

Namun ditahun 2024 memiliki target 80% terealisasi 95,7% dengan capaian 120% hal ini menunjukkan adanya peningkatan yang begitu pesat dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini tidak terlepas dari Sosialisasi dan kerjasama yang lebih intensif kepada Perangkat Daerah terhadap pentingnya penganggaran yang responsive gender sehingga ditahun 2024 sebanyak 45 Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan pembangunan yang responsif gender dari 47 Perangkat Daerah yang ada.

## SASARAN 2 : MENURUNNYA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Sasaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu :

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian
Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	1%	0,01%	100%

Prevalensi Kekerasan terhadap perempuan diperoleh dari jumlah perempuan dewasa yang mengalami kekerasan dibagi jumlah penduduk perempuan dewasa dikali 100 persen. Semakin kecil nilai yang diperoleh menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

Berikut formula dalam menghitung prevalensi kekerasan terhadap perempuan (KtP) :

$$= \frac{\text{Jumlah Perempuan Dewasa yang mengalami kekerasan}}{\text{Jumlah Penduduk Perempuan Dewasa}} \times 100\%$$

Pada tahun 2022 terdapat 21 kasus perempuan dewasa yang mengalami kasus kekerasan, sementara jumlah penduduk perempuan dewasa pada tahun 2022 sebanyak 316.084 . yang setelah dilakukan perhitungan diperoleh nilai 0,000066 dengan capaian 100%. Pada Tahun 2023 terjadi 33 kasus perempuan dewasa yang mengalami kekerasan sementara jumlah penduduk perempuan dewasa pada tahun 2023 sebanyak 322,052 jiwa. Setelah dilakukan kalkulasi diperoleh nilai 0,0001% dengan capaian 100%. Pada Tahun 2024 terjadi 27 kasus perempuan dewasa yang mengalami kekerasan sementara jumlah

penduduk perempuan dewasa pada tahun 2024 sebanyak 219,744 jiwa. Setelah dilakukan kalkulasi diperoleh nilai 0,01% dengan capaian 100%. Dengan begitu target kinerja telah tercapai.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan :

1. Adanya sosialisasi kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan stakeholder terkait hingga forum anak tingkat desa.

Permasalahan / Hambatan :

1. Kasus kekerasan terhadap perempuan merupakan sebuah fenomena gunung es. Karena hanya sebagian kecil kasus yang terlihat dan dilaporkan dari kasus yang terjadi.

Solusi :

1. Melakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan yang dimulai dari level keluarga

### **SASARAN 3 : MENINGKATNYA PERLINDUNGAN ANAK**

Sasaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu :

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian
Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak	NINDYA	Data Belum Rilis	

Kabupaten/Kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan

dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Tujuan KLA secara umum adalah Untuk memenuhi hak dan melindungi anak. Sedangkan secara khusus : Untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk : kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA), pada suatu wilayah kabupaten/kota.

Indikator KLA Terdiri dari 6 indikator kelembagaan dan 25 indikator substansi yang dikelompokkan dalam 5 klaster hak anak yaitu klaster:

- 1) Hak Sipil dan Kebebasan
- 2) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
- 3) Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar
- 4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya
- 5) Perlindungan khusus

Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak terdiri atas lima predikat, yaitu Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan Kabupaten/Kota Layak Anak. Penilaian daerah untuk menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak dilakukan oleh Tim Verifikasi Lapangan Hybrid Evaluasi Kabupaten Layak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik

Indonesia terhadap 24 indikator. Selanjutnya, tim yang terdiri atas tim independen dan tim dari kementerian/lembaga terkait melakukan verifikasi administratif, verifikasi lapangan, hingga verifikasi final.

Indikator kinerja Tingkat Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak Pada tahun 2023 memiliki target Nindya terealisasi Madya dengan capaian Madya dan untuk Realisasi tingkat capaian KLA Tahun 2024 belum rilis dikarenakan tahap Verifikasi Lapangan langsung oleh tim Verifikasi Lapangan Kementerian PPPA Pusat Jakarta belum dilaksanakan.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan :

1. Adanya peningkatan data dukung dari perangkat daerah

Permasalahan / Hambatan :

1. Masih belum terealisasinya PERDA Layak Anak
2. Belum seluruhnya instansi terkait memenuhi kriteria Kabupaten/Kota Layak Anak

Solusi :

1. Merencanakan dan menganggarkan penunjang kegiatan
2. Meningkatkan kerjasama yang lebih intensif bersama mitra perangkat daerah untuk kelangsungan system data gender dan anak
3. Rapat Koordinasi GT KLA harus dilakukan lebih rutin

**SASARAN 4 : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH**

Sasaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu :

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian
Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB

Penilaian Akuntabilitas Kinerja didapat dari evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat yang melakukan analisis yang sistematis, Pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Capaian Kinerja atas Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Adalah Sebagai Berikut:

INDIKATOR KINERJA	2024			Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	2022	2021	2020
Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB	B	CC

### **Analisis Efisiensi**

Berdasarkan data capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran terhadap masing-masing sasaran, maka dapat dilakukan analisis efisiensi terhadap masing-masing sasaran seperti terlihat pada tabel berikut :

SASARAN	CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	48,29	48,29	51,71%
Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	52,02	52,02	47,98%
Meningkatnya Perlindungan Anak	41,14	39,74	60,26%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	86,00	86,00	14,00%

Pencapaian sasaran strategis pertama yaitu Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dengan indikator kesatu Indeks Pembangunan Gender (IPG) target 91,5 dan indikator kedua Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG dengan target Indikator 80%, Realisasi Anggaran 48,29%, sementara Capaian Kinerja 48,29% sehingga tingkat Efisiensi Anggaran sebesar 51,71%. Secara umum tidak terdapat permasalahan pada pelaksanaan Indikator tersebut sehingga pencapaian kinerja sangat baik.

Pencapaian sasaran strategis kedua yaitu Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan dengan Indikator Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan dengan target Indikator 1%, Realisasi Anggaran 52,02%,

sementara Capaian Kinerja 52,02% sehingga tingkat Efisiensi Anggaran sebesar 47,98%. Secara umum tidak terdapat permasalahan pada pelaksanaan Indikator tersebut sehingga pencapaian kinerja sangat baik.

Pencapaian sasaran strategis ketiga yaitu Meningkatnya Perlindungan Anak dengan Indikator Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak dengan target Indikator NINDYA Realisasi Anggaran 39,74% sementara Capaian Kinerja 41,14% sehingga tingkat Efisiensi Anggaran sebesar 60,26%. Secara umum tidak terdapat permasalahan pada pelaksanaan Indikator tersebut sehingga pencapaian kinerja sangat baik.

Pencapaian sasaran strategis keempat yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah target Indikator BB Realisasi Anggaran 86,00% sementara Capaian Kinerja 86,00% sehingga tingkat Efisiensi Anggaran sebesar 14,00%. Secara umum tidak terdapat permasalahan pada pelaksanaan Indikator tersebut sehingga pencapaian kinerja sangat baik.

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

NO	SASARAN	Indikator Kinerja	Program Pendukung
1.	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Program sistem data gender dan anak
		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
2.	Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	Program perlindungan perempuan
			Program peningkatan kualitas keluarga
3.	Meningkatnya Perlindungan Anak	Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak	Program pemenuhan hak anak (PHA)
			Program perlindungan khusus anak
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota

## B. Realisasi Anggaran

Secara keseluruhan Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis pada Perubahan Anggaran Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 13.128.739.767,- (tiga belas milyar seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) Belanja Modal Rp.114.920.500,-. Realisasi anggaran per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 10.111.507.221,- (sepuluh milyar seratus sebelas juta lima ratus tujuh ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) atau sekitar 77,01%, realisasi ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun

sebelumnya yang mencapai 92,62% hal ini dikarenakan adanya tunda bayar pada pihak ketiga serta adanya kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena kegiatan tersebut direncanakan pada bulan desember namun karena adanya keterlambatan dalam pencairan anggaran sehingga tidak cukup waktu untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

Adapun Penyerapan anggaran terdiri dari 5 (lima) Program pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Bengkalis dengan Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2024 sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	48,29	Rp 1.594.205.997	Rp 769.869.547	48,29
	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)				
Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	52,02	Rp 310.540.954	Rp 161.531.922	52,02
Meningkatnya Perlindungan Anak	Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak	41,14	Rp 1.021.317.856	Rp 405.821.646	39,74
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja	86,00	Rp 10.202.674.960	Rp 8.774.284.106	86,00
TOTAL			Rp. 13.128.739.767	Rp. 10.111.507.221	77,01

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun 2024. Penulisan LAKIP ini perwujudan dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknik Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Untuk di masa yang akan datang perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kinerja dan komitmen pencapaian kinerja yang lebih terarah, penyusunan program dan kegiatan sesuai sasaran serta peningkatan kualitas kinerja pada setiap unit dan jajaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis dan Evaluasi

terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran.

Laporan Kinerja Tahun 2024 ini menyajikan berbagai keberhasilan dan kelemahan capaian strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis pada Tahun Anggaran 2024. Untuk tujuan dan sasaran indikator yang terdiri dari 5 indikator Kinerja Utama (IKU) keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis belum seluruhnya memenuhi target capaian kinerja yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dengan indikator kesatu Indeks Pembangunan Gender (IPG) target 91,5 terealisasi 89,91 dan Capaian 98,26. Indikator kedua Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG target 80% terealisasi 95,7% dan capaian kinerja 120%
2. Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan dengan indikator Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan target 1% terealisasi 0,01% dan capaian kinerja 100%
3. Meningkatnya Perlindungan Anak dengan indikator Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak target Nindya Realisasi dan capaian belum dapat diketahui karena Data dari KemenPPPA Belum Rilis.
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah dengan target BB untuk realisasi

masih menunggu laporan hasil evaluasi penilaian dari Inspektorat Kabupaten Bengkalis

Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) serta adanya upaya koordinasi dan kerjasama dengan melibatkan berbagai pihak baik instansi pusat maupun daerah untuk pencapaian target yang telah ditetapkan kedepannya semakin baik.

Demikianlah Laporan ini dibuat sebagai bahan laporan dan evaluasi kinerja program oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis.

Bengkalis, 23 Mei 2025

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS,**



**EMILDA SUSANTI, S. STP, M. IP**

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP.19810323 199912 2 001

# LAMPIRAN